

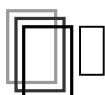
# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

## DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PERTANIAN

Jl. Letjen. S. Parman No. 23 Telp. / Faks. 0281 – 891011  
PURBALINGGA 53317



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian Tahun 2022. LKJIP Dinas Pertanian tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP .

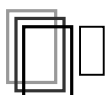
Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

**MUKODAM, S.Pt.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590614 198603 2 005



## IHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pertanian dalam kurun waktu Tahun 2017 s/d 2022 secara bertahap bermaksud mewujudkan sistem Pertanian produktif berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal dan hutan lestari untuk meningkatkan kemandirian pangan nilai tambah daya saing dan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan visi Dinas Pertanian Tahun 2017 s/d 2022.

Guna mewujudkan visi dimaksud salah satu tujuan utama Dinas Pertanian adalah Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan petani.

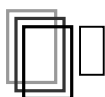
Mengacu pada tujuan dimaksud, maka sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 :

1. Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan tahun 2022 dari target Rp. 2.673.353.358.000 realisasi 2.741.168.897.550 atau 102,54%.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2022, Dinas Pertanian telah melaksanakan 6 Program, 19 kegiatan dan 40 Sub kegiatan sumber anggaran APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 50.976.947.000,-

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja akuntabilitas kinerja Dinperten Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022

1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) dari target Rp. 6.573.771.390.000, realisasi sebesar Rp 6.805.997.970.000 atau 103,53 %.
2. Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan tahun 2022 dari target Rp. 2.673.353.358.000 realisasi 2.741.168.897.550 atau 102,54 %
3. Nilai SAKIP dari target nilai 69,25, realisasi nilai 71,36 atau 103,05 %.
4. Keberhasilan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar 100,41 %
5. Keberhasilan realisasi kegiatan fisik 100 % dan keuangan 95,76 %



## BAB. I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

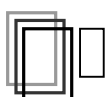
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan organisasi kerja perangkat daerah yang handal, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kedudukan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga untuk selanjutnya disingkat Dinperten, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Dinperten Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 256 orang pegawai.

Program/Kegiatan pembangunan urusan pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian telah melaksanakan 6 Program, 19 kegiatan dan 40 Sub kegiatan sumber anggaran APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 50.976.947.000,-



Tabel 1.1  
Jumlah PNS, CPNS dan PTT Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2022

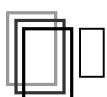
No	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS	CPNS	PTT	PNS Dpb		
1	SD	1		5		6	3,26
2	SMP	2		5		7	3,80
3	SMA	24		8		32	17,39
4	D3	49				49	26,63
5	S1	72	3	2		77	41,85
6	S2	13				13	7,07
	Jumlah	161	3	20		184	100,00

Tabel 1.2  
Pegawai Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan  
Tahun 2022

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol I	2		2	1,24
2	Gol II	47		47	29,19
3	Gol III	95	3	98	60,87
4	Gol IV	14		14	8,67
	Jumlah	158	3	161	100,00

Tabel 1.3  
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural  
Tahun 2022

No	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	I	-
2	II	-
3	III	4
4	IV	10
	Jumlah	14

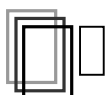


Tabel 1.4  
Data Pegawai Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon  
Tahun 2022

No	Tingkat Esselon	Jumlah
1	II a	-
2	II b	1
3	III a	1
4	III b	2
5	IV a	12
6	IV b	2
	Jumlah	18

Tabel 1.5  
Pembagian Staf Dinas Pertanian Kabupaten  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah Pejabat (orang)	Jumlah Staf (orang)
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris Dinas	1	
3	Kasubag Perencanaan	1	2
4	KaSubag Umum	1	14
6	KaSubag Keuangan	1	4
7	Bidang Tanaman Pangan	1	
8	Seksi Produksi Tanaman Pangan	1	2
9	Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	1	2
10	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.	1	4
11	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	1	
12	Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura,	1	2
13	Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	1	2
14	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Hortikultura	1	5
15	Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	
16	Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan	1	12
17	Seksi Kesehatan Hewan	1	4
18	Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1	4



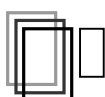
19	UPTD Perbenihan	1	8
20	UPTD Kesehatan Hewan	1	6
21	18 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan.	18	158
22	Kelompok Jabatan Fungsional		10

## 1. Daftar asset yang dikelola

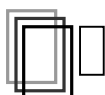
Aset yang di kelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga meliputi Tanah/Kebun, Gedung/Kantor dan Sarana Prasarana Kantor yang meliputi, 65 Jenis barang

Tabel 1.6  
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jenis,  
Jumlah dan Kondisi Tahun 2022

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	Gedung	12	8	4	-
2	Kendaraan Roda 4	6	4	1	1
3	Kendaraan Roda 2	53	25	28	-
4	Komputer	24	12	12	-
5	Laptop	8	4	-	4
6	Printer	23	12	11	-
7	Handycam	1	-	-	-
8	Camera Digital	4	4	-	-
9	Kursi Lipat	150	130	20	-
10	Kursi Tamu/Meja Tamu	7	7	-	-
11	Kursi Kayu	64	30	34	-
12	Kursi Putar	25	12	13	-
13	Meja Tulis	6	6	-	-
14	Meja Komputer	15	-	15	-
15	Meja Telephone	1	1	-	-
16	Meja Tambahan	-	-	-	-
17	Meja Rapat Pim.	-	-	-	-
19	Meja Rapat	42	42	-	-
20	Filing Kabinet	30	22	18	-
21	Rak Buku	3	3	-	-
22	Telephone	1	1	-	-
23	Telephone Lokal	14	14	-	-
24	Lemari	62	26	36	-
25	Rak Besi	-	-	-	-
26	Kursi Rapat	189	189	-	-
27	Lemari Es	3	3	-	-
28	VCD	7	7	-	-
29	TV	14	9	5	-



30	Mesin Pompa Air	4	4	-	-
31	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
32	Peti Uang	3	3	-	-
33	Vacum Cleaner	-	-	-	-
34	White Board Electric	-	-	-	-
35	Mesin Tik Manual	17	-	17	-
36	White Board	7	7	-	-
37	OHP	9	-	9	-
38	Wireless	8	-	8	-
39	Mesin Tik Electric	-	-	-	-
40	Plotter	-	-	-	-
41	Radio	5	-	5	-
42	Podium	-	-	-	-
43	Stabilizer	-	-	-	-
44	AC	4	4	-	-
45	Lemari Data	10	7	3	-
46	Jam Dinding	-	-	-	-
47	Rak Arsip	5	5	-	-
48	Screen	-	-	-	-
49	Peta	2	2	-	-
50	Kipas Angin	1	1	-	-
51	Foto Presiden/ Wakil	1	1	-	-
52	Lambang Garuda	1	1	-	-
53	Dispenser	1	1	-	-
54	UPS	-	-	-	-
55	Scanner	6	6	-	-
56	Projector	5	4	-	-
57	Faximile	1	1	-	-
58	Sound System	2	2	-	-
59	Voice Recorder	-	-	-	-
60	Finger Print	-	-	-	-
61	Fasilitas Internet	1	1	-	-
62	GPS	4	4	-	-
63	Altimeter	-	-	-	-
64	Telekompren	-	-	-	-
65	Komputer Tablet	1	1	-	-





## B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga

## C. Maksud dan Tujuan

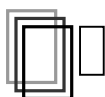
### 1. Maksud

Sebagai pelaporan pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga atas mandat yang telah diberikan oleh Bupati Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan *akuntable* serta berorientasi pada hasil.

### 2. Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Dinas Pertanian adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan ditahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja ditahun mendatang;



3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun .

#### **D. Gambaran Umum**

Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga di bentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Urusan yang di bebaskan oleh Bupati Purbalingga kepada Dinperten Kabupaten Purbalingga adalah Urusan Pertanian, dituangkan dalam Target Kinerja dan Program/Kegiatan Tahun 2022.

Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah dibebankan pada OPD Dinperten ditelah di susun Rencana Strategik Tahun 2017–2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2017-2022, Khususnya misi yang ke V (Lima)

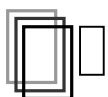
Susunan Organisasi Dinas Pertanian

(Dinperten) Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Perbenihan dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

#### **E. Permasalahan utama (*strategic issued*)**

Permasalahan utama pada urusan pertanian, di Kabupaten Purbalingga secara umum meliputi.

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global yang mengakibatkan adanya serangan hama penyakit, timbulnya bencana alam banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau,
2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana pertanian,
3. Status dan kepemilikan lahan < 0,5 Ha,
4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani,
5. Masih rawannya ketahanan pangan,
6. Belum berjalanya diversifikasi pangan dengan baik,



## **F. Sistematika Penulisan**

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Tujuan
- D. Gambaran Umum
- E. Permasalahan Utama
- F. Sistematika Penulisan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja

BAB III

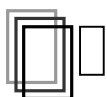
AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV

PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- B. Permasalahan Yang Dihadapi
- C. Permasalahan Strategi Pemecahan Masalah



## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada dan Swasembada berkelanjutan (swasembada jagung, kedelai dan gula untuk mendukung program nasional dan swasembada berkelanjutan padi) Peningkatan Nilai tambah dan daya saing ekspor
2. Menurunnya lahan kritis
3. Peningkatan kesejahteraan petani.

Sasaran–sasaran dimaksud perlu prioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya visi Dinas Pertanian yaitu; **“Pertanian produktif, berkelanjutan, yang berbasis sumberdaya lokal dan hutan lestari untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan petani”**.

Guna mencapai sasaran dimaksud pada tahun 2022 telah ditetapkan 6 Program, 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

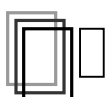
### A. PERENCANAAN STRATEGIS

#### 1. Visi Kabupaten Purbalingga

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2022 yaitu: **“Purbalingga yang maju, mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan dan berakhlak mulia”**

#### 2. Misi Kabupaten Purbalingga

Kinerja OPD Dinas Pertanian mengacu pada Misi Ke 5 Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu : **“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan, manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”**.



### 3. Tujuan Pembangunan Pertanian,

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh OPD Dinas Pertanian yaitu :

- a. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal
- b. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan
- c. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan
- d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian dan
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

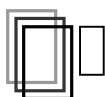
### 4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran 2022
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	2.673.353.358.000

### 5. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Bidang Pertanian

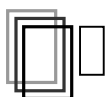
- a. Pengembangan agribisnis dengan fokus pada rehabilitasi kelembagaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan inovasi serta penyerapan teknologi agar mampu meningkatkan kuantitas, kualitas dan daya saing produk pertanian
- b. Peningkatan upaya kecukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka merehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta mengembalikan fungsi kawasan lindung
- d. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui optimalisasi pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.



## B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022.

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	6.573.771.390.000
		Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	2.673.353.358.000
		Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	69,25



### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak–pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pertanian pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk proses menjadi keluaran penting dan pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

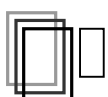
#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Hingga akhir tahun 2022, Capaian Kinerja Dinas Pertanian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2022

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	6.573.771.390.000	6.805.997.970.000	103,53
		Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	2.673.353.358.000	2.741.168.897.550	102,54
		Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	69,25	71,36	103,05

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.



Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

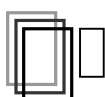
Capaian PDRB sektor Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar Rp. 6.805.997.970.000 atau 103,53 % dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 6.573.771.390.000.

Rincian PDRB per sub sektor dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	Sub Sektor	Nilai PDRB (Rp)	%
1	Tanaman Pangan	1.257.404.360.000	18,47%
2	Perkebunan	1.248.123.130.000	18,34%
3	Hortikultura	2.632.976.940.000	38,69%
4	Peternakan	1.667.493.540.000	24,50%
Jumlah		6.805.997.970.000	100,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat sumbangan tertinggi PDRB sektor pertanian dari sub sektor hortikultura sebesar Rp. 2.632.976.940.000 atau 38,69% dari total nilai PDRB sektor pertanian, disusul dari sub sektor peternakan (24,50%), tanaman pangan (18,47%) dan yang terakhir dari sub sektor perkebunan (18,34%)

Nilai produksi pertanian adalah nilai dari komoditas pertanian yang dihasilkan oleh sektor produksi pertanian, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi pertanian dengan harga per unit komoditas pertanian tersebut. Harga per unit dinyatakan pada harga produsen pada saat komoditas tersebut diproduksi.





Dilihat dari data terakhir, nilai produksi pertanian sebesar Rp. 2.716.657.082.000 melebihi dari target Rp. 2.741.168.897.550 yang telah ditetapkan atau 102,54%, nilai produksi tersebut berasal dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

#### Nilai Produksi Pertanian dari komoditas Tanaman Pangan

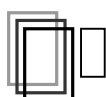
No	Komoditas	Produksi	Satuan	Harga (Rp.)	Nilai Produksi (Rp.)	%
1	Padi	201.236.900	kg	5.500	1.106.802.950.000	80,00 %
2	Jagung	36.868.000	kg	6.500	239.642.000.000	17,75 %
3	Kedelai	276.700	kg	12.000	3.320.400.000	0,25 %
Sub Total					1.349.765.350.000	100,00 %

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi padi sebesar Rp. 1.106.802.950.000 dari total nilai produksi pertanian Rp. 1.349.765.350.000 atau sebesar 80,00%, disusul oleh nilai produksi jagung sebesar Rp. 239.642.000.000 atau 17,75%, dan kedele sebesar 3.320.400.000 atau 0,25 %, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi tanaman pangan berasal dari komoditas padi (80,0%) hal ini menunjukkan bahwa nilai produksi tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh komoditas padi, sedangkan jagung menyumbang 17,75 % dan kedele hanya menyumbang 0,25% dari nilai produksi tanaman pangan.

#### Nilai produksi komoditas hortikultura dan perkebunan

No	Komoditas	Produksi	Satuan	Harga (Rp)	Nilai Produksi (Rp.)	%
1	Manggis	213.600	kg	7.700	1.644.720.000	0,36%
2	Durian	775.400	kg	33.000	25.588.200.000	5,64%
3	Kelapa Dalam	5.852.864	kg	7.600	44.481.766.400	9,80%
4	Kelapa Deres	28.287.625	kg	13.100	370.567.887.500	81,61%
5	Lada	182.725	kg	60.000	10.963.500.000	2,41%
6	Kopi	39.971	kg	20.000	799.420.000	0,18%
Sub Total					454.045.493.900	100,00%

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari tanaman hortikultura dan perkebunan sebesar Rp. 454.045.493.900 persentase tertinggi sumbangan nilai produksi hortikultura dan perkebunan berasal dari komoditas deres 81,67 %, disusul oleh



kelapa dalam 9,80 %, sedangkan sumbangan terkecil dari komoditas kopi yaitu 0,18%.

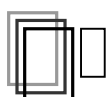
#### Nilai produksi komoditas peternakan

No	Komoditas	Populasi	Satuan	Karkas/betina produktif	Daging	harga (Rp.)	Nilai produksi (Rp.)	%
1	Sapi	12.597	ekor	175	1.653.356 kg	125.000	206.669.531.250	22,05%
2	Kambing	286.893	ekor	14	2.811.551 kg	136.000	382.370.990.400	40,79%
3	Ayam Broiler (pedaging)	4.968.370	ekor	1,3	6.458.881 kg	24.000	155.013.144.000	16,54%
4	Ayam Layer (petelur)	963.662	ekor	0,6754	8.786.563 kg	22.000	193.304.388.000	20,62%
Sub Total							937.358.053.650	100,00 %

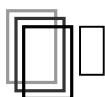
Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari komoditas peternakan sebesar Rp. 937.358.053.650, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi peternakan berasal dari komoditas kambing (40,79%), disusul oleh komoditas sapi (22,05%), layer (20,62%), dan broiler (16,54%) Perhitungan komoditas peternakan untuk masing-masing komoditas dilakukan konversi daging, hal ini disebabkan karena harga jualnya berdasarkan berat daging (kg), konversi sapi 1 ekor menghasilkan karkas 175 kg (50% dari berat hidup) dan daging sebanyak 75 % dari berat karkas, konversi 1 ekor kambing menghasilkan karkas 14 kg dan daging sebanyak 70 persen dari berat karkas, konversi 1 ayam broiler menghasilkan karkas sebanyak 1,3 kg dan nilai produksi ayam petelur dihitung dari jumlah populasi dikalikan 84,54% yang merupakan populasi produktif (usia 18 minggu sampai dengan 90 minggu), hasil dari jumlah populasi produktif dikalikan 67,54 persen yang merupakan betina produktif, kemampuan betina dalam bertelur adalah 70%, konversi telur untuk 1 kg terdapat sekitar 16 butir.

Guna mencapai kinerja tersebut, Dinas pertanian Kabupaten Purbalingga didukung dengan berbagai sub kegiatan :

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi untuk pembayaran langganan internet selama 12 bulan 18 BPP dalam rangka updating kartu tani, bantuan colour sorter 1 unit, combine harvester 1 unit, RMU 1 unit dan rumah RMU 1 paket berasal dari anggaran DAK, Sekolah Lapangan dan Rapat dalam rangka peningkatan kapasitas UPJA dan Pemanfaatan alsintan, Pendampingan, verifikasi dan penyaluran alat mesin pertanian sebanyak 100 bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani. Hasil sub kegiatan yaitu terlaksananya updating kartu tani, peningkatan kelas UPJA dan pendampingan penyerahan alsintan.

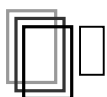


2. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan berupa Demplot dan sekolah lapang (SL) penangkaran benih sebanyak 4 Kelompok tani calon penangkar benih padi seluas total 30 ha yaitu Poktan Ngudi Makmur Desa Sidakanggan, Poktan Tirta Utama Desa Rabak, Poktan Suka Damai Desa Penican dan Poktan Tirta Kencana Desa Tejasari. Bantuan sarana produksi organik di Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah Kelompok Tani Ngudi Rahayu seluas 5 ha dan Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari Kelompok Tani Karya Tani seluas 5 ha, berupa bantuan pupuk kandang, pupuk hayati dan benih padi organik. Hasil sub kegiatan yaitu peningkatan SDM kelompok tani dalam hal penangkaran benih.
3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman untuk terlaksananya bantuan saprodi (bibit, pupuk) dan handsprayer serta shaker untuk budidaya tanaman buah-buahan dan cabai rawit serta perbenihan duku. Sarana perbenihan duku berupa pupuk NPK 400 kg, bokashi 3.900 kg, pupuk kalisium nitrat 400 kg dan pupuk MKP 40 kg serta seker (alat pengocok mikroorganisme sekunder) 1 unit untuk kelompok tani Tunas Harapan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang. Hand sprayer sebanyak 70 unit yang sudah disalurkan sebanyak 32 unit kepada 22 kelompok, 1-2 unit per kelompok tani/ kelompok wanita tani. Bibit cabai sebanyak 96 baki, yang sudah disalurkan sebanyak 78 baki kepada 18 kelompok tani/ kelompok wanita tani 1-10 baki. Bibit buah-buahan berupa bibit durian 1.145 batang, bibit alpukat sebanyak 1.200 batang dan bibit manggis sebanyak 1.000 batang. Bibit durian disalurkan kepada 11 kelompok tani 100-150 batang per kelompok. Bibit alpukat disalurkan kepada 13 kelompok tani 50-300 batang per kelompok tani. Bibit manggis disalurkan kepada 8 kelompok tani 50-300 batang per kelompok tani. Bantuan hibah uang untuk pengadaan kambing sebanyak 27 kelompok. Hasil sub kegiatan yaitu terlaksananya bantuan saprodi (bibit, pupuk) dan handsprayer serta shaker untuk budidaya tanaman buah-buahan dan cabai rawit serta perbenihan duku
4. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak untuk pengadaan pupuk, obat-obatan, dan pemeliharaan tanaman Balai Benih Padi Mewek 19 ha, Balai Benih Padi Karangemiri 7 ha, Kebun Induk Perkebunan Cendana 2 ha, menghasilkan benih padi dan hasil tanaman perkebunan. Hasil dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya operasional kebun benih dan tersedianya calon benih bermutu di masyarakat.
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya digunakan untuk pembangunan gudang tembakau 1 unit di kelompok tani Karya Raharja Desa Serang Kecamatan Karangreja, bantuan saprodi tembakau (pupuk, pestisida



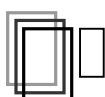
dan mulsa) sebanyak 2 paket untuk kelompok tani Karya Raharja Lestari Desa Serang dan kelompok tani Sida Berkah Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja), bantuan kendaraan roda tiga sebanyak 3 unit untuk kelompok tani Sida Berkah, Giri Waluyo Desa Kutabawa dan Sida Urip Desa Serang Kecamatan Karangreja. bantuan cultivator sebanyak 5 unit untuk 5 kelompok tani di Desa Serang dan Kutabawa, bantuan power sebanyak 6 unit sprayer untuk 6 kelompok tani di Desa Serang dan Kutabawa Kecamatan Karangreja.

6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani digunakan untuk pembangunan sumur pantek sebanyak 4 paket bersumber dari anggaran DAK, berlokasi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja, Desa Wlahar Kecamatan Rembang, Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dan Desa Kalapacung Kecamatan Bobotsari, pembangunan jaringan irigasi dari anggaran DAK sebanyak 3 paket berlokasi di Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol, Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol. Pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak 17 paket berasal dari anggaran APBD berlokasi di Komplek Bataliyon 406 Desa Bajong Kecamatan Purbalingga, Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari, Desa Jetis Kecamatan Kemangkon, Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah, Desa Karanggambas Kecamatan Padamara, Desa Karangjambe Kecamatan Padamara, Desa Talagening Kecamatan Bobotsari, Desa Senon Kecamatan Kemangkon, Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol, Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah, Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, Desa Limbangan Kecamatan Kutasari, Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari, Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol, Desa Makam Kecamatan Rembang, Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon dan Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet. Hasil dari sub kegiatan ini berupa meningkatnya Indek Pertanaman (IP) di lokasi pekerjaan dan bertambahnya luas oncoran di lokasi kegiatan.
7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani untuk pembangunan jalan usaha tani sejumlah 2 paket berasal anggaran DAK berlokasi di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol. Pembangunan jalan usaha tani yang berasal dari anggaran APBD berlokasi di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah, Desa Cendana Kecamatan Kutasari, Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari, Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah, Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah, Desa Galuh Kecamatan Bojongsari, Desa Munjul Kecamatan Kutasari, Desa Munjul Kecamatan Kutasari, Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah, Desa



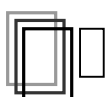
Gandasuli Kecamatan Bobotsari, Desa Larangan Kecamatan Pengadegan, Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan, Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol, Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Desa Karangturi Kecamatan Mrebet, Dusun V Desa Cendana Kecamatan kutasari, Desa Gunung Wuled, Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon, Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara, Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah, Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dan Desa Mewek Kecamatan Kalimanah . Hasil sub kegiatan yaitu lancarnya transportasi sarana produksi ke lokasi budidaya dan pengangkutan hasil panen.

8. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya, berasal dari anggaran DAK digunakan untuk Pembangunan 2 BPP yaitu BPP Kertanegara dan BPP Kaligondang. Hasil sub kegiatan yaitu meningkatnya fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi, gerakan pembangunan pertanian, pembelajaran, konsultasi agribisnis, dan pengembangan jejaring kemitraan serta meningkatnya pelayanan kepada petani maupun kelompok tani.
9. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, berasal dari anggaran DAK digunakan untuk Rehabilitasi Puskesmas yaitu Puskesmas Bobotsari dan Puskesmas Bukateja. Hasil sub kegiatan yaitu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner.
10. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak untuk kegiatan upland yang berlokasi di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan, terdiri dari pembangunan jalan usaha tani 39 paket sepanjang 7 km, pembangunan kandang kambing 16 paket, pembangunan sumur bor/sumur gali dan instalasinya 17 paket, pengadaan alat pengolah pupuk organik 16 paket, yang dilaksanakan secara swakelola oleh penerima kegiatan/kelompok tani, sedangkan pengadaan kambing betina 800 ekor untuk breeding stock, pengadaan kambing untuk penggemukan (fattening) sebanyak 1.280 ekor dilaksanakan secara tender, pengadaan kambing jantan 32 ekor, pengadaan bibit rumput 160.000 batang, pengadaan pupuk kandang 21.760 kg, pengadaan konsentrat 28.800 kg, pengadaan bibit lada 122.880 batang, pengadaan pupuk kandang untuk lada 820.200 kg, pengadaan pestisida untuk lada 2.400 saset, pengadaan frozen semen 650 straw, pengadaan hand sprayer 64 unit, bantuan obat-obatan 1 paket



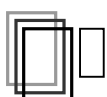
dan pembangunan bak perendaman lada 1 unit. Hasil sub kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan ternak kambing dan budidaya lada.

11. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis terlaksananya monitoring kegiatan pusat kesehatan hewan 12 kali, pengawasan obat hewan 12 kali, disinfeksi *avian influenza* 20 kali, pengadaan obat-obatan hewan 2 paket dan pengadaan bahan pelayanan kesehatan hewan 2 paket dan belanja kedokteran lainnya berupa alat bedah minor 1 paket. Hasil sub kegiatan ini berupa meningkatnya derajat kesehatan ternak, terkendalinya penyakit hewan menular serta penyakit zoonosis khususnya penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK), pendeteksian dini penyakit hewan dan tersedianya obat yang bermutu dan terregistrasi, bahan material kesehatan hewan untuk memfasilitasi kegiatan di UPT Puskesmas.
12. Penyediaan Jasa Medik Veteriner untuk operasional pengobatan sapi 1.621 ekor, kerbau 20 ekor, kambing 1.959 ekor, domba 193 ekor, dan hewan kecil (anjing, kucing, kelinci) 63 ekor, pengambilan sampel darah sapi untuk uji RBT 32 ekor, sampel darah ayam untuk uji titer ND 200 sampel, sampel darah ayam untuk uji titer AI 200 ekor, uji feses (endoparasit) sapi 300 sampel, uji darah toxoplasma 100 sampel, uji hog cholera 40 sampel. Hasil dari sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan ternak dan mengetahui status penyakit yang ada di hewan ternak.
13. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan untuk pemeriksaan sampel PAH 70 sampel, pemantauan rutin pangan asal hewan 36 kali, antemortem hewan Qurban 36 kali dan postmortem hewan Qurban 36 kali, pemantauan PAH menjelang hari raya Idul Fitri dipasar konsumsi 4 kali. Hasil dari kegiatan berupa tersedianya produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) di masyarakat.
14. Pendampingan Unit Kesejahteraan Hewan untuk digunakan untuk pengawasan dan pemeriksaan pemotongan sapi di RPH 1.420 ekor, monitoring pemotongan unggas 48 kali, dan rehabilitasi gedung RPH 1 paket. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pelayanan pemotongan hewan yang sesuai standar penanganan hewan.
15. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk fasilitasi pertemuan penanganan hama terpadu 6 kali berlokasi di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja untuk komoditas cabai dan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong untuk komoditas kopi, pelatihan agensi hayati sebanyak 4 kali berlokasi di Desa Kutabawa Kecamatan



Karangreja, pemberian bantuan power sprayer 2 unit untuk kelompok tani Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja, Demplot dan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tikus menggunakan TBS (*Trap Barrier System*) sejumlah 3 paket di Poktan Pagentan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang, Poktan Tirta Utama Desa Rabak Kecamatan Kalimanah, Poktan Ngudi Makmur Desa Sidakangen Kecamatan Kalimana, gerakan pengendalian (gerdal) hama di Poktan Suka Damai Desa Panican Kecamatan Kemangkon, Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang dan pengadaan pestisida 1 paket. Hasil dari kegiatan ini terkendalnya hama dan penyakit tanaman.

16. Penanganan Dampak Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk bantuan bahan bakar minyak (BBM) sejumlah 209 liter dalam rangka penanganan dampak bencana pertanian seluas 1,4 ha, bantuan benih padi sejumlah 1.802 kg untuk penanganan bencana pertanian, pembayaran premi AUDP (asuransi usaha tani padi) seluas 2.500 ha, dan pendampingan program konversi BBM ke BBG berupa bantuan pompa air dari Kementerian ESDM. Hasil kegiatan yaitu berkurangnya luasan sawah yang terdampak puso akibat dampak perubahan iklim dan bencana pertanian.
17. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa untuk terlaksananya pelatihan hasil peternakan 4 kali berlokasi di KWT Desa Banjaran Kecamatan Bobotsari, KWT Desa Bandingan Kecamatan Kejobong, KWT Desa Kedarpan Kecamatan Pengadegan, KWT Desa Timbang dan Nangkasawit Kecamatan Kejobong, pelatihan temati 18 BPP, dan pembayaran kuota BPP untuk admin palaporan utama. Hasil kegiatan yaitu meningkatkan SDM penyuluh dan anggota kelompok tani.
18. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa digunakan untuk Pelatihan Budidaya Tembakau dan Pelatihan Pasca Panen Tembakau. Pelatihan Budidaya Tembakau bertempat di desa Serang Kecamatan Karangreja dengan peserta sejumlah 40 orang. Pelatihan pasca panen tembakau juga bertempat di desa Serang Kecamatan Karangreja dengan peserta 20 orang. Selain itu digunakan untuk diversifikasi tanaman tembakau yaitu bantuan bibit kopi sebanyak 1.725 batang dan pupuk kandang sebanyak 20.000 kg, yang diserahkan ke Gapoktan Giri Mulya Desa Kutabawa kecamatan Karangreja, fasilitasi perbenihan kentang 1 paket untuk Gapoktan Sukses Makmur Desa Serang Kecamatan Karangreja, fasilitasi kegiatan KTNA, fasilitasi perbenihan stroberi 1 paket untuk kelompok Tani Sida Urip Desa Serang Kecamatan Karangreja, program penyuluhan, saprodi pengolahan gula kelapa organik 1 paket serta



hibah uang untuk penguatan kelembagaan sebanyak 78 kelompok. Hasil kegiatan meningkatnya SDM pertanian terutama komoditas kentang dan stroberi, tersusunnya program penyuluhan tahun 2022 untuk 18 kecamatan, terselenggaranya kegiatan KTNA dan tersalurnya pemberian hibah sejumlah 78 kelompok.

19. Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian untuk terlaksananya operasional 18 BPP Kecamatan, pembayaran listrik dan air, rehabilitasi gedung BPP Purbalingga, Bojongsari, Karanganyar dan Karangjambu, Pengadegan dan demplot BPP. Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya operasional BPP kecamatan dan terpeliharanya gedung BPP kecamatan.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian target sasaran kinerja :

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja yaitu :

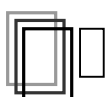
1. Adanya fluktuasi harga produk pertanian terutama untuk produk hortikultura
2. Adanya serangan hama penyakit tanaman karena cuaca yang ekstrim
3. Masuknya penyakit baru yang menyerang pada ternak yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan tingkat morbiditas (kesakitan) yang sangat mencapai 100%.

Solusi dan inovasi untuk pemecahan masalah tersebut diatas adalah :

1. Gerakan pembelian produk pertanian bagi PNS Kabupaten Purbalingga
2. Dilaksanakannya Gerdal (Gerakan Pengendalian) terhadap serangan hama penyakit
3. Pemberian vaksinasi untuk ternak, kontrol keluar masuk ternak dari dan masuk kabupaten Purbalingga, melakukan biosekuritas/desinfeksi untuk pengendalian penyakit PMK.

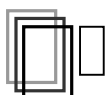
## B. Realisasi Anggaran

**Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022**

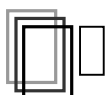




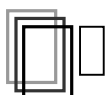
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Rp.	%
1	2	3	5	6
	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>50.976.947.000</b>	<b>48.815.635.525</b>	<b>95,76%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.792.724.000</b>	<b>22.769.413.287</b>	<b>95,70%</b>
	<b>1 Perencanaan, Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,00%</b>
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6.000.000	6.000.000	100,00%
	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00%
	<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>22.796.056.000</b>	<b>21.836.785.752</b>	<b>95,79%</b>
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.569.517.000	21.615.002.565	95,77%
	2.2 Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.169.000	66.413.187	93,32%
	2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	155.370.000	155.370.000	100,00%
	<b>3 Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00%</b>
	3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00%
	<b>4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49.794.000</b>	
	4.1 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	50.000.000	49.794.000	
	<b>5 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>61.269.000</b>	<b>60.623.600</b>	<b>98,95%</b>
	5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.569.000	2.569.000	100,00%
	5.2 Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	28.400.000	28.289.600	99,61%
	5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.400.000	2.040.000	85,00%
	5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.700.000	20.525.000	99,15%
	5.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.200.000	7.200.000	100,00%
	<b>6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>605.898.000</b>	<b>565.139.835</b>	<b>93,27%</b>
	6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.240.000	406.500	32,78%
	6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000	81.695.980	77,36%
	6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.800.000	11.800.000	100,00%
	6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	487.258.000	471.237.355	96,71%
	<b>7 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>248.501.000</b>	<b>226.070.100</b>	<b>90,97%</b>



	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.621.000	206.268.100	90,22%
	7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.580.000	9.580.000	100,00%
	7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.300.000	10.222.000	99,24%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>3.399.045.000</b>	<b>3.210.993.864</b>	<b>94,47%</b>
	<b>1</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>1.582.070.000</b>	<b>1.557.869.900</b>	<b>98,47%</b>
	1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.452.970.000	1.430.024.900	98,42%
	1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	129.100.000	127.845.000	99,03%
	<b>2</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.360.775.000</b>	<b>1.203.438.000</b>	<b>88,44%</b>
	2.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan	110.000.000	109.041.000	99,13%
	2.2	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman	1.250.775.000	1.094.397.000	87,50%
	<b>3</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>456.200.000</b>	<b>449.685.964</b>	<b>98,57%</b>
	3.1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	456.200.000	449.685.964	98,57%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>20.617.993.000</b>	<b>19.801.331.067</b>	<b>96,04%</b>
	<b>1</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>473.250.000</b>	<b>470.713.720</b>	<b>99,46%</b>
	1.1	Koordinasi dan Sikronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	473.250.000	470.713.720	99,46%
	<b>2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>9.187.893.000</b>	<b>8.474.819.507</b>	<b>92,24%</b>
	2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.803.500.000	2.801.445.507	99,93%
	2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.169.500.000	3.166.077.000	99,89%
	2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya	2.109.000.000	1.630.051.000	77,29%
	2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Prasarana Pertanian Lainnya	1.105.893.000	877.246.000	79,32%
	<b>3</b>	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.956.850.000</b>	<b>10.855.797.840</b>	<b>99,08%</b>
	3.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	10.956.850.000	10.855.797.840	99,08%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		<b>384.559.000</b>	<b>379.227.219</b>	<b>98,61%</b>



	1	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>258.935.000</b>	<b>256.316.750</b>	<b>98,99%</b>
	1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	258.935.000	256.316.750	98,99%
	2	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.680.000</b>	<b>28.555.000</b>	<b>99,56%</b>
	2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	28.680.000	28.555.000	99,56%
	3	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>23.280.000</b>	<b>23.035.200</b>	<b>98,95%</b>
	3.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23.280.000	23.035.200	98,95%
	4	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan</b>	<b>73.664.000</b>	<b>71.320.269</b>	<b>96,82%</b>
	4.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	73.664.000	71.320.269	96,82%
V		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>396.730.500</b>	<b>379.074.660</b>	<b>95,55%</b>
	1	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>396.730.500</b>	<b>379.074.660</b>	<b>95,55%</b>
	1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	138.210.500	136.700.500	98,91%
	1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	258.520.000	242.374.160	93,75%
VI		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2.385.895.500</b>	<b>2.275.595.428</b>	<b>95,38%</b>
	1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>2.385.895.500</b>	<b>2.275.595.428</b>	<b>95,38%</b>
	1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Kota	201.114.000	198.968.000	98,93%
	1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.861.302.500	1.757.409.313	94,42%
	1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	280.979.000	276.898.315	98,55%
	1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	42.500.000	42.319.800	99,58%



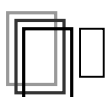
#### **D. Permasalahan dan Solusi.**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. SDM dan kelembagaan pertanian masih lemah
2. Budidaya tradisional, belum efektif dan efisien, tenaga kerja pertanian tidak tersedia
3. Ketersediaan air dan infrastruktur pertanian belum memadai
4. Saprodi mahal, penggunaan belum tepat, kesulitan mendapat bibit/belum dapat membuat benih/bibit sendiri (hortikultura)
5. Resiko usaha pertanian tinggi (serangan OPT dan bencana)
6. Akses petani terhadap modal dan pasar lemah

Solusi dan inovasi untuk pemecahan masalah tersebut diatas adalah :

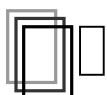
1. Program penyuluhan pertanian (pembentukan kelompok pemuda tani, duta petani milenial/andalan, jaringan petani nasional, bintek, pelatihan dan magang bagi poktan/gapoktan, pendampingan dan penyuluhan penguatan kelembagaan poktan/gapoktan oleh PPL, sekolah lapang, webinar
2. Mekanisasi/modernisasi pertanian melalui bantuan alsintan, pelatihan operator alsintan, demplot/denfarm teknologi budidaya pertanian, peningkatan IP, penggunaan bibit unggul, inseminasi buatan, pakan fermentasi perbaikan pasca panen, penerapan pupuk berimbang, SIMURP
3. Pembangunan/peningkatan prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, dam parit, embung, sumur pantek, irigasi perpipaan, pompanisasi, bantuan bibit dan gerakan penanaman tanaman keras produktif bernilai konservasi tinggi (perkebunan dan hortikultura/buah-buahan) seperti kopi, kelapa, alpokat, manggis, durian pada daerah atas/tangkapan air.
4. Perbaikan penyaluran pupuk subsidi, pengembangan pelatihan dan aplikasi pupuk organik berbahan baku lokal, pembuatan mikro organisme lokal (MOL), pupuk berimbang, pengembangan poktan penangkar benih mandiri, pemagangan penangkaran benih kentang dan strowbery dari kultur jaringan, penyediaan screen house perbenihan.
5. Gerakan pengendalin hama tanaman, sekolah lapang pengendalian hama terpadu, trap barrier system, bantuan obat pengendali OPT, bantuan alsintan pengendalian OPT, pengobatan ternak masal, vaksinasi, asuransi usaha tani padi, penanaman refugia, pembuatan rumah burung hantu (rubuha), bantuan BBM pompanisasi dan brigade alsintan.



6. Mendorong akses kredit program KUR pertanian, kredit mawar (melawan rentenir), bantuan penguatan usaha/kegiatan kelembagaan tani, pasar tani off line dan on line, kemitraan petani / poktan/gapoktan/KUB dengan perusahaan perdagangan besar dan industri, pelatihan pemasaran online, perbaikan penanganan pasca panen, grading, bantuan alat panen, pasca panen dan pengolahan (cold storage, alat/mesin kemas, pengembangan pertanian organik, pengembangan komoditas pertanian ekspor, dan gerakan konsumsi produk petani lokal.

**E. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan**

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu dilaporkan



## IV. PENUTUP

### A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

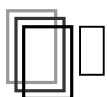
1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) dari target Rp. 6.573.771.390.000, realisasi sebesar Rp.....atau .....%,
2. Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan tahun 2022 dari target Rp. 2.673.353.358.000 realisasi 2.741.168.897.550 atau 102,54 %
3. Nilai SAKIP dari target nilai 69,25, realisasi nilai 71,36 atau 103,05 %.

### B. Permasalahan Yang Dihadapi

1. SDM dan kelembagaan pertanian masih lemah
2. Budidaya tradisional, belum efektif dan efisien, tenaga kerja pertanian tidak tersedia
3. Ketersediaan air dan infrastruktur pertanian belum memadai
4. Saprodi mahal, penggunaan belum tepat, kesulitan mendapat bibit/belum dapat membuat benih/bibit sendiri (hortikultura)
5. Resiko usaha pertanian tinggi (serangan OPT dan bencana)
6. Akses petani terhadap modal dan pasar lemah

### C. Strategi Pemecahan Masalah,

1. Program penyuluhan pertanian (pembentukan kelompok pemuda tani, duta petani milenial/andalan, jaringan petani nasional, bintek, pelatihan dan magang bagi poktan/gapoktan, pendampingan dan penyuluhan penguatan kelembagaan poktan/gapoktan oleh PPL, sekolah lapang, webinar
2. Mekanisasi/modernisasi pertanian melalui bantuan alsintan, pelatihan operator alsintan, demplot/denfarm teknologi budidaya pertanian, peningkatan IP, penggunaan bibit unggul, inseminasi buatan, pakan fermentasi perbaikan pasca panen, penerapan pupuk berimbang, SIMURP
3. Pembangunan/peningkatan prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, dam parit, embung, sumur pantek, irigasi perpipaan, pompanisasi, bantuan bibit dan gerakan penanaman tanaman keras produktif bernilai konservasi tinggi (perkebunan dan hortikultura/buah-buahan) seperti kopi, kelapa, alpokat, manggis, durian pada daerah atas/tangkapan air.
4. Perbaikan penyaluran pupuk subsidi, pengembangan pelatihan dan aplikasi pupuk organik berbahan baku lokal, pembuatan mikro organisme lokal (MOL), pupuk berimbang, pengembangan poktan penangkar benih mandiri, pemagangan



penangkaran benih kentang dan strowbery dari kultur jaringan, penyediaan screen house perbenihan.

5. Gerakan pengendalian hama tanaman, sekolah lapang pengendalian hama terpadu, trap barrier system, bantuan obat pengendali OPT, bantuan alsintan pengendalian OPT, pengobatan ternak masal, vaksinasi, asuransi usaha tani padi, penanaman refugia, pembuatan rumah burung hantu (rubuha), bantuan BBM pompanisasi dan brigade alsintan.
6. Mendorong akses kredit program KUR pertanian, kredit mawar (melawan rentenir), bantuan penguatan usaha/kegiatan kelembagaan tani, pasar tani off line dan on line, kemitraan petani / poktan/gapoktan/KUB dengan perusahaan perdagangan besar dan industri, pelatihan pemasaran online, perbaikan penanganan pasca panen, grading, bantuan alat panen, pasca panen dan pengolahan (cold storage, alat/mesin kemas, pengembangan pertanian organik, pengembangan komoditas pertanian ekspor, dan gerakan konsumsi produk petani lokal).

Purbalingga, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga

**MUKODAM, S.Pt.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590614 198603 2 005

